



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURSIGIT BINTORO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN
3. NHK : 963021

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/36 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/80 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 149 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **236.800.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO MOBIL PENUMPANG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU AYLA MOBIL PENUMPANG Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, SUZUKI UK 125 SC A/T Tahun 2011, Rp. 3.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SE 88 / MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOTOR, YAMAHA 2 DP NON ABS / N MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
6. MOTOR, YAMAHA 45P / BYSON Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.



5.000.000

7. MOTOR, YAMAHA B 65 / AEROX Tahun 2018, HASIL SENDIRI

Rp. 15.000.000

8. MOTOR, HONDA C 70 Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 63.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.360.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.360.300.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.360.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.